

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Grand Theory

1.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak yaitu pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). (Menurut Jensen dan Meckling 1976) mendefinisikan teori keagenan merupakan hubungan yang didalamnya terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberi wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Teori keagenan (*agency theory*) merupakan dasar teori yang digunakan untuk memahami *Good Corporate Governance*. Teori keagenan memiliki hubungan kontraktual antara anggota-anggota di suatu perusahaan. Adapun prinsip utama dari teori ini adalah untuk menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu para investor dengan pihak yang menerima wewenang yaitu para manajer (Gudono 2017).

Konsep *agency theory* adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principle*, sedangkan *agent* adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principle*, dimana teori keagenan berperan penting bagi akuntansi terutama dalam menyediakan informasi setelah suatu kejadian yang disebut sebagai peran pasca keputusan. Peran ini sering di asosiasikan dengan peran pengurusan akuntansi, dimana seorang *agent* melapor kepada *principle* tentang kejadian-kejadian di masa lalu (scott 2015).

2.2 Integritas Laporan Keuangan

Integritas Merupakan komitmen manajemen atau pimpinan dalam implementasi *good corporate governance*(GCG) di perusahaan. Integritas berisikan komitmen atau pernyataan janji untuk melaksanakan segala tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini manajemen memiliki

tugas dan tanggung jawab untuk selalu bertindak jujur (*honest*), dapat dipercaya, menghindarkan diri dari konflik kepentingan (*Conflict of interest*), anti KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) serta anti suap (Effendi 2015).

Selain itu, laporan keuangan yang memiliki integritas tinggi juga membantu mereka mengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan investasi (Herlin, 2009). Laporan keuangan dikatakan memiliki integritas bila laporan keuangan tersebut memenuhi prinsip dan syarat kualitas laporan keuangan. Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur (Irawati 2016). Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan.

Laporan keuangan yang berintegritas harus memenuhi dua karakteristik utama laporan keuangan yaitu relevan dan keandalan. Informasi keuangan yang memiliki integritas yang tinggi akan dapat diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur sehingga memungkinkan pengguna informasi bergantung pada informasi tersebut. Dalam penelitian ini, integritas laporan keuangan diproksikan dengan konservatisme. Konservatisme adalah sikap atau aliran dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan yang terjelek dari ketidakpastian tersebut (Indrasari 2016)

2.3 Corporate Governance

Pengertian Corporate Governance menurut (FCGI) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Istilah *corporate governance* ini muncul karena adanya *agency theory*, dimana kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan. (Effendi 2016).

Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja manajemen, dengan hal itu investor dan pihak lainnya dapat menilai, mengukur, dan mengawasi sampai sejauh mana manajemen bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan para investor. Namun demikian, penyampaian laporan keuangan yang diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan ternyata dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Akuntansi yang dicatat dengan basis akrual (*accrual basis*) merupakan subyek *managerial discretion*, karena fleksibilitas yang diberikan dapat memberikan dorongan kepada manajer untuk memodifikasi laporan keuangan agar dapat menghasilkan laporan laba seperti yang diinginkan, meskipun menciptakan distorsi dalam pelaporan laba (Andry Priharta 2017). Salah satu cara yang diharapkan dapat digunakan untuk mengontrol biaya keagenan yaitu dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Dengan demikian *corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan dan diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997).

corporate governance dapat berbeda tergantung atas mekanisme pemilik perusahaan dalam mempengaruhi manajer. Secara umum terdapat dua jenis mekanisme *corporate governance*, yaitu (1) mekanisme internal *corporate governance* merupakan cara pengendalian perusahaan dengan menggunakan berbagai elemen yang ada di dalam organisasi, misalnya dengan kepemilikan saham oleh para manajer, dan (2) mekanisme eksternal *corporate governance*

merupakan cara pengendalian perusahaan dengan menggunakan mekanisme eksternal perusahaan misalnya dengan menghadirkan *reputational agent* seperti profesi akuntan. Mekanisme eksternal bertujuan untuk mendisiplinkan perilaku pihak *insider* agar lebih transparan dan *accountable* dalam mengelola perusahaan. Mekanisme *good corporate governance* ditandai dengan adanya beberapa proksi, yang diantaranya adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kualitas audit (Priharta 2017).

2.3.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik didalam maupun luar negeri serta saham yang dimiliki pemerintah dalam maupun luar negeri. Investor institusional merupakan investor yang memiliki pengalaman sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan efektif dan tidak mudah dipengaruhi oleh tindakan manajer seperti manipulasi laporan keuangan. Oleh karena itu, keberadaan investor institusional dapat meningkatkan integritas laporan keuangan perusahaan. Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic*. Semakin banyak kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan maka tingkat integritas laporan keuangan semakin tinggi, karena investor institusional merupakan pemegang saham yang memiliki pengaruh besar terhadap kepemilikan sahamnya (effendi 2016).

Pengawasan perlu dilakukan karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan yang akan menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Mekanisme pengawasan merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah perusahaan. Salah satu pengawasan yang dapat dilakukan adalah melalui monitoring oleh investor institusional, yang dapat mendorong manajemen untuk lebih fokus pada pencapaian kinerjanya sehingga dapat mengurangi perilaku mementingkan diri sendiri para manajer (Jama'an, 2008). Moghaddam, *et al.* (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional

memiliki pengaruh positif terhadap laba konservatif, demikian pula (Ramalingegowda dan Yu 2014) menjelaskan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi ternyata lebih membutuhkan laporan keuangan yang konservatif. Selanjutnya (Jama'an 2014) menyimpulkan bahwa *corporate governance* dengan proksi kepemilikan saham institusional berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Demikian pula penelitian (Wulandari dan Budiarta 2014), (Aljufri 2014), serta (Putra dan Muid 2013) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan (Andry Priharta 2017).

2.3.2 Kepemilikan Manajerial

kepemilikan manajerial adalah kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan pada perusahaan yang bersangkutan. Jika kepemilikan manajerial di dalam perusahaan semakin tinggi maka manajemen akan lebih meningkatkan kinerjanya karena manajemen memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham. Manajer cenderung memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mengelola perusahaan dan menyajikan laporan keuangan dengan informasi yang benar dan jujur untuk kepentingan pemegang saham dan dirinya sendiri. Peningkatan kepemilikan manajerial dalam perusahaan mampu mendorong manajer untuk menghasilkan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer dalam bertindak terhadap kegiatan akuntansi. Sehingga kebijakan yang dilakukan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan yang disajikan.(effendi 2016).

Kepemilikan manajerial merupakan mekanisme yang dapat diterapkan dalam mengurangi kecurangan integritas laporan keuangan. Manajer pada perusahaan akan cenderung memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan perusahaan sehingga manajer harus membuat keputusan terbaik untuk kesejahteraan perusahaan. Dengan demikian manajer akan melaporkan laporan keuangan dengan benar dan jujur sehingga laporan keuangan tersebut mempunyai integritas yang tinggi. Penelitian (Pancawati 2014) menyebutkan kepemilikan

manajerial berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan (Pratama 2015).

2.3.3 Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik merupakan presentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak luar (*outsider ownership*). Menurut Febriantina (201) menyatakan kepemilikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan oleh masyarakat umum atau pihak luar termasuk didalamnya terdapat masyarakat umum serta investor dari lembaga atau perusahaan lain yang ingin menanamkan modalnya pada perusahaan yang melakukan penawaran saham.

Publik yang dimaksudkan dalam variabel tersebut berupa pribadi atau suatu institusi, dimana keberadannya menuntut untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang jelas, jujur, dan tepat waktu. Semakin banyak kepemilikan publik diperusahaan maka perusahaan lebih dituntut untuk memberikan informasi laporan keuangan dengan jelas dan jujur agar mendapatkan kepercayaan yang lebih dari pihak investor saat ini maupun dimasa mendatang (Effendi 2016).

2.3.4 Komite Audit

Komite audit menurut UU BUMN merupakan ketentuan yang di atur dalam UU No.19 tahun 2003 tanggal 19 juni 2003, pasal 70 UU tersebut menyebutkan bahwa komisaris dan dewan pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi untuk membantu komisaris dan dewan pengawas dalam melakukan tugasnya.komite audit tersebut dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada komisaris atau dewan pengawas, ketua komite audit adalah anggota komisaris independen, yang diangkat oleh komisaris (Effendi 2016).

Komite audit merupakan komite yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai penghubung antara audit eksternal dan dewan direksi, internal auditor serta anggota independen yang memiliki tugas memberikan pengawasan auditor dan

memastikan pihak manajemen untuk melakukan tindakan korektif yang tepat terhadap hukum dan regulasi. Komite audit dalam perusahaan bertujuan untuk memantau perilaku manajemen yang berkaitan dengan proses penyusunan laporan keuangan sehingga dapat meminimalkan manajemen untuk melakukan manipulasi data.

Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang anggota komisaris independen. Berdasarkan keputusan BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2000 dan SE07/PM/2004 menyatakan bahwa suatu perusahaan yang go public wajib memiliki komite audit karena alasan tersebut maka pengukuran komite audit menjadi jumlah anggota komite audit. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan (Sari 2017).

2.3.5 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah badan dalam perusahaan yang beranggotakan dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan dan berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Komisaris independen berperan dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku para manajer sehingga dapat melindungi hak para pemegang saham eksternal. Semakin banyak dewan komisaris diperusahaan akan membuat sulitnya menjalankan tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang nantinya akan berdampak pada laporan keuangan yang semakin menurun (Effendi 2016).

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

salah satu permasalahan dalam penerapan corporate governance adalah adanya CEO yang memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan dewan

komisaris, Padahal fungsi dari dewan komisaris adalah untuk mengawasi kinerja dari dewan direksi yang dipimpin oleh CEO tersebut. Oleh karena itu diperlukannya komisaris independen (*independent commissioner*) yang berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang (*controveiling power*). (Sari 2017).

2.3.6 Dewan Direksi

Pengertian dewan direksi menurut menteri BUMN adalah tugas dan tanggung jawab direksi diatur dalam pasal 19 dalam peraturan menteri negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada BUMN adalah direksi harus melaksanakan tugasnya dengan iktikad baik untuk keppentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, serta memperhatikan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semakin banyak dewan direksi didalam perusahaan maka semakin tinggi integritas laporan keuangan, karena dengan adanya dewan direksi mampu mengatur kebijakan yang dijalankan perusahaan. Apabila perusahaan tidak menginformasikan laporan keuangan dengan jujur dan jelas maka dewan direksi yang memiliki wewenang dan menindak lanjuti yang dilakukan para manajer perusahaan guna melindungi para investor (Sari 2017).

2.3.7 Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah susunan keanggotaan yang terdiri dari komisaris dari luar perusahaan (komisaris independen) dan komisaris dari dalam perusahaan (Sari 20017). Proporsi dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan. Semakin banyak dewan komisaris dapat berakibat makin buruknya kualitas laporan keuangan dan kinerja yang dimiliki perusahaan. Hal ini dijelaskan dengan adanya *agency*

problem yaitu dengan makin banyak anggota dewan komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya (Sari 2017).

2.3.8 Sekretaris Perusahaan

Sekretaris perusahaan (*corporate secretary*) merupakan seseorang yang memiliki tugas membantu pimpinan nya dalam sebuah organisasi perusahaan, dalam hal ini sekretaris sangat berperan penting dalam sebuah perusahaan, peran penting sekretaris perusahaan adalah sebagai faktor penunjang dalam berhasilnya tugas dan tujuan pekerjaan yang merupakan cerminan pimpinan kepada bawahan, sebagai sumber informasi yang dibutuhkan pimpinan didalam memenuhi tanggung jawab, dan tugas.

Sekretaris perusahaan (*corporate secretary*) memiliki peranan penting dalam implementasi GCG, khususnya pada perusahaan public dan emiten di bursa. Hal tersebut disebabkan bahwa posisi dan tugas atau fungsi yang di emban oleh sekretaris perusahaan sangatlah strategis serta menentukan karena merupakan ujung tombak perusahaan dengan pihak ketiga. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, di indonesia ternyata masih banyak masyarakat atau public, pemangku kepentingan (*stake holder*), dan manajemen perusahaan yang belum menyadari pentingnya sekretaris perusahaan. Meskipun eksistensi sekretaris perusahaan di indonesia tidak dikenal dalam UU No. 40 TAHUN 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT) maupun UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal (UU PM) yang saat ini berlaku, namun ketentuan tentang sekretaris perusahaan telah diatur melalui kebijakan otoritas jasa keuangan (d / h Bapepam-LK), peraturan bursa efek, UU tentang BUMN, serta kebijakan menteri BUMN (Effendi 2016)

2.3.9 Kualitas Audit

Kualitas audit sebagai suatu kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji

tergantung pada kemampuan teknikal auditor sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor tersebut. Kualitas audit ini sangat penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Puspita 2016).

kualitas audit secara langsung berhubungan dengan ukuran dari perusahaan audit, dengan proksi untuk ukuran perusahaan audit adalah jumlah klien. Perusahaan audit yang besar adalah dengan jumlah klien yang lebih banyak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan audit yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan audit yang kecil. Karena perusahaan audit yang besar jika tidak memberikan kualitas audit yang tinggi akan kehilangan reputasinya, dan jika ini terjadi maka dia akan mengalami kerugian yang lebih besar dengan kehilangan klien.

2.3.10 Fee Audit

Auditor atas jasa profesionalnya dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan akan mendapatkan imbalan yang berupa *fee* audit. *Fee* audit yang dibayarkan kepada auditor atau KAP, harus disepakati antara klien dan KAP yang telah disesuaikan dengan kebijakan penentuan *fee* audit yang diterbitkan oleh IAPI dalam sebuah surat keputusan. Jika KAP menerima *fee* audit yang tinggi, maka KAP akan menghadapi tekanan ekonomis untuk memberikan opini yang bersih (dalam hal ini wajar tanpa pengecualian) dan dilain sisi juga dalam rangka mempertahankan klien itu sendiri sehingga tidak berpindah pada KAP atau auditor lain. (Puspita 2016) meneliti pengaruh independensi terhadap integritas laporan keuangan. Independensi dalam penelitian ini dinyatakan melalui berapa besar *fee* audit yang dibayarkan klien kepada auditor. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pada tahun 2003 independensi yang dinyatakan dengan besarnya *fee* audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan. *Fee* audit merupakan hal yang tidak kalah pentingnya di dalam penerimaan penugasan. Auditor bekerja untuk memperoleh penghasilan yang

memadai. Oleh sebab itu penentuan *fee* audit perlu disepakati antara klien dengan auditor (Halim, 2008:106).

Penetapan biaya audit yang dilakukan oleh KAP berdasarkan perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Besar *fee* audit yang dibayarkan klien kepada auditor juga bisa berpengaruh. Jika KAP menerima *fee* audit yang tinggi, maka KAP akan menghadapi tekanan ekonomis untuk memberikan opini yang bersih (dalam hal ini wajar tanpa pengecualian) dan dilain sisi juga dalam rangka mempertahankan klien itu sendiri sehingga tidak berpindah pada KAP atau auditor lain (Puspita 2016). Jadi untuk mencapai laporan keuangan yang berintegritas, diperlukan adanya kemampuan auditor yang tinggi dalam mengerjakan tugas mengauditnya dengan memberikan *fee* audit yang cukup agar auditor dapat memberikan kualitas audit yang baik sehingga dihasilkan laporan keuangan yang berintegritas tinggi.

membuktikan bahwa biaya audit berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Biaya yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh (Puspita 2016) bahwa manajer perusahaan yang rasional tidak akan memilih auditor yang berkualitas tinggi dan membayar *fee* yang tinggi apabila kondisi perusahaan yang tidak baik. (Gammal 2012) membuktikan bahwa perusahaan multinasional dan bank-bank di Lebanon lebih memilih untuk membayar biaya audit yang bernominal besar dengan alasan yaitu mereka lebih mencari auditor yang dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas. (Puspita 2016) menemukan bahwa independensi yang diukur dengan *fee* audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4

Penelitian Terdahulu

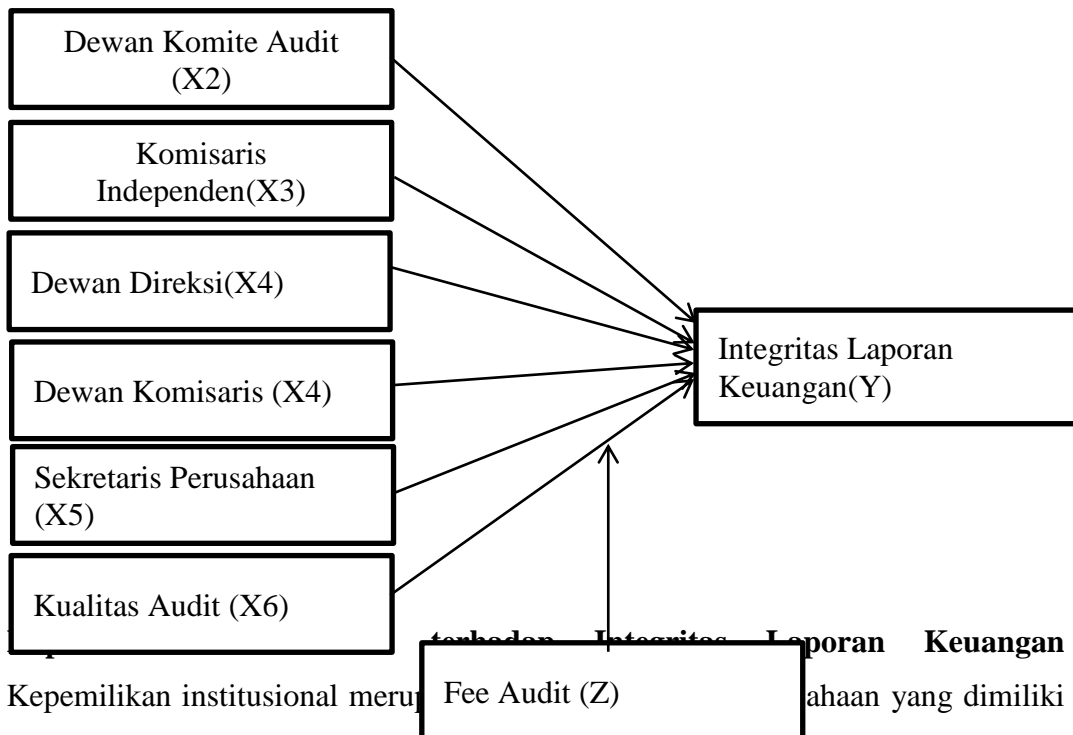
Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian
Andry Priharta(2017)	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan	menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan, sementara komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif signifikan, terhadap integritas laporan keuangan.
Linda Irawati & Iwan Fakhruddin(2017)	Pengaruh Dan Kualitas Audit <i>Corporate Governance</i> Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Hasil penelitian ini memnunjukkan bahwa kualitas audit, komite audit, komisaris independen dan kepemilikan institusioanl secara simultan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, dengan nilai signifikansi sebesar 0,002.

		<p>Kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap integritas laporan keuangan dengan nilai signifikansi 0,018. Komite audit tidak berpengaruh</p>
Nimas Intan Permatasari(2017)	<p>Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2015</p>	<p>Berdasarkan analisis, penelitian ini membuktikan bahwa komite audit dan publik kepemilikan mempengaruhi integritas laporan keuangan, sedangkan variabel institusional kepemilikan, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi dan dewan komisaris tidak mempengaruhi integritas laporan keuangan.</p>
Made Ayu Prilla Winda Puspita & I Made Karya	<p><i>Fee</i> Audit Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kualitas</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit dan <i>fee</i></p>

Utama(2016)	Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan	audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan variabel <i>fee</i> audit tidak mampu memoderasi pengaruh kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan.
-------------	--	--

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan urutan teoritis dan tinjauan penelitian diatas, maka variabel independen penelitian adalah independensi, pengaruh corporate governance (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, dewan direksi, dewan komisaris, sekretaris perusahaan), kualitas audit, dan fee audit sebagai variabel pemoderasi Sedangkan variabel dependennnya adalah Integritas laporan keuangan. Berdasarkan hubungan diantara variabel tersebut dapat digambarkan kedalam kerangka sebagai berikut:



oleh perusahaan lain baik didalam maupun luar negeri serta saham yang dimiliki pemerintah dalam maupun luar negeri. Investor institusional merupakan investor yang memiliki pengalaman sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan efektif dan tidak mudah dipengaruhi oleh tindakan manajer seperti manipulasi laporan keuangan. Oleh karena itu, keberadaan investor institusional dapat meningkatkan integritas laporan keuangan perusahaan. Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic*. Semakin banyak kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan maka tingkat integritas laporan keuangan semakin tinggi, karena investor institusional merupakan pemegang saham yang memiliki pengaruh besar terhadap kepemilikan sahamnya.

Pengawasan perlu dilakukan karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan yang akan menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Mekanisme pengawasan merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah perusahaan. Salah satu pengawasan yang dapat dilakukan adalah melalui monitoring oleh investor institusional, yang dapat mendorong manajemen untuk lebih fokus pada pencapaian kinerjanya sehingga dapat mengurangi perilaku mementingkan diri sendiri para manajer (Jama'an, 2008). Moghaddam, *et al.* (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap laba konservatif, demikian pula Ramalingegowda dan Yu (2011) menjelaskan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi ternyata lebih membutuhkan laporan keuangan yang konservatif. Selanjutnya Jama'an (2008) menyimpulkan bahwa *corporate governance* dengan proksi kepemilikan saham institusional berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Demikian pula penelitian Wulandari dan Budiarta (2014), Aljufri (2014), serta Putra dan Muid (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan (Priharta 2017).

2.5.2 Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan

Komite audit merupakan komite yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai penghubung antara audit eksternal dan dewan direksi, internal auditor serta anggota independen yang memiliki tugas memberikan pengawasan auditor dan memastikan pihak manajemen untuk melakukan tindakan korektif yang tepat terhadap hukum dan regulasi. Komite audit dalam perusahaan bertujuan untuk memantau perilaku manajemen yang berkaitan dengan proses penyusunan laporan keuangan sehingga dapat meminimalkan manajemen untuk data Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang anggota komisaris independen. Berdasarkan keputusan BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2000 dan SE07/PM/2004 menyatakan bahwa suatu perusahaan yang *go public* wajib memiliki komite audit karena alasan tersebut maka pengukuran komite audit menjadi jumlah anggota komite audit. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan.

2.5.3 Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan

Komisaris independen adalah badan dalam perusahaan yang beranggotakan dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan dan berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Komisaris independen berperan dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku para manajer sehingga dapat melindungi hak para pemegang saham eksternal (Ida Ayu & I Gede 2013). Semakin banyak dewan komisaris diperusahaan akan membuat sulitnya menjalankan tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang nantinya akan berdampak pada laporan keuangan yang semakin menurun (Pancawati, 2010).

2.5.4 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Integritas Laporan Keuangan

Dewan direksi adalah pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan. Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Direksi adalah organ perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas

pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Dewan direksi mempunyai peran penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan yaitu untuk menentukan kebijakan yang akan dijalankan perusahaan serta perlindungan terhadap pihak investor dalam jangka pendek ataupun jangka panjang (Aji, 2012). Semakin banyak dewan direksi didalam perusahaan maka semakin tinggi integritas laporan keuangan, karena dengan adanya dewan direksi mampu mengatur kebijakan yang dijalankan perusahaan. Apabila perusahaan tidak menginformasikan laporan keuangan dengan jujur dan jelas maka dewan direksi yang memiliki wewenang dan menindak lanjuti yang dilakukan para manajer perusahaan guna melindungi para investor.

2.5.5 Dewan Komisaris terhadap Integritas Laporan Keuangan

Dewan komisaris adalah susunan keanggotaan yang terdiri dari komisaris dari luar perusahaan (komisaris independen) dan komisaris dari dalam perusahaan (Tia, 2011). Proporsi dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan. Semakin banyak dewan komisaris dapat berakibat makin buruknya kualitas laporan keuangan dan kinerja yang dimiliki perusahaan (Pancawati, 2010). Hal ini dijelaskan dengan adanya *agency problem* yaitu dengan makin banyak anggota dewan komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya (Pancawati, 2010).

2.5.6 Sekretaris perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan

Sekretaris perusahaan (*corporate secretary*) memiliki peranan penting dalam implementasi GCG, khususnya pada perusahaan public dan emiten di bursa. Hal tersebut disebabkan bahwa posisi dan tugas atau fungsi yang di emban oleh sekretaris perusahaan sangatlah strategis serta menentukan karena merupakan ujung tombak perusahaan dengan pihak ketiga. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, di Indonesia ternyata masih banyak masyarakat atau public, pemangku kepentingan (*stake holder*), dan manajemen perusahaan yang belum menyadari pentingnya sekretaris perusahaan. Meskipun eksistensi sekretaris perusahaan di

Indonesia tidak dikenal dalam UU No. 40 TAHUN 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT) maupun UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal (UU PM) yang saat ini berlaku, namun ketentuan tentang sekretaris perusahaan telah diatur melalui kebijakan otoritas jasa keuangan (d / h Bapepam-LK), peraturan bursa efek, UU tentang BUMN, serta kebijakan menteri BUMN (Effendi 2014).

2.5.7 Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan

Kualitas audit sebagai suatu kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kemampuan teknis auditor sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor tersebut. Kualitas audit ini sangat penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (De Angelo, 1981 dalam Citra, 2013). De Angelo (1981) dalam Hardiningsih (2010) berargumentasi bahwa kualitas audit secara langsung berhubungan dengan ukuran dari perusahaan audit, dengan proksi untuk ukuran perusahaan audit adalah jumlah klien, Perusahaan audit yang besar adalah dengan jumlah klien yang lebih banyak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan audit yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan audit yang kecil. Karena perusahaan audit yang besar jika tidak memberikan kualitas audit yang tinggi akan kehilangan reputasinya, dan jika ini terjadi maka dia akan mengalami kerugian yang lebih besar dengan kehilangan klien. (Saputra 2014)

memperlihatkan bahwa kualitas audit terbukti berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. (Saputra 2014) dalam penelitiannya juga memperlihatkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. (Cahyani 2011) menyatakan bahwa reputasi auditor yang diukur dengan menggunakan KAP *Bigfour* tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

2.5.8 Fee Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan

Auditor atas jasa profesionalnya dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan akan mendapatkan imbalan yang berupa *fee* audit. *Fee* audit yang dibayarkan kepada auditor atau KAP, harus disepakati antara klien dan KAP yang telah disesuaikan dengan kebijakan penentuan *fee* audit yang diterbitkan oleh IAPI dalam sebuah surat keputusan. Jika KAP menerima *fee* audit yang tinggi, maka KAP akan menghadapi tekanan ekonomis untuk memberikan opini yang bersih (dalam hal ini wajar tanpa pengecualian) dan dilain sisi juga dalam rangka mempertahankan klien itu sendiri sehingga tidak berpindah pada KAP atau auditor lain. Susiana dan (Herawaty 2007) meneliti pengaruh independensi terhadap integritas laporan keuangan. Independensi dalam penelitian ini dinyatakan melalui berapa besar *fee* audit yang dibayarkan klien kepada auditor. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pada tahun 2003 independensi yang dinyatakan dengan besarnya *fee* audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

